

ANALISA HUKUM ATAS UPAYA PENGAJUAN PASPOR DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN PALSU SEBAGAI PERSYARATAN DATA KEPENDUDUKAN

Deky Aprian

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri
Jakarta
e-mail:

Abstrak

Dalam penggunaan Dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam Praktek masih banyak yang disalahgunakan oleh pemegangnya, sehingga menimbulkan sebuah ancaman ke negara Indonesia yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana atas upaya penggunaan dokumen kependudukan palsu dalam proses pengajuan paspor pada Kantor Imigrasi. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Diperoleh hasil penelitian bahwa Hukum keimigrasian merupakan bagian dari aturan hukum positif yang ada di Indonesia dan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit. Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-undang Keimigrasian menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi berhak menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Beberapa ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan paspor, antara lain Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kata Kunci: Paspor, Dokumen Palsu, Data Kependudukan, Tindak Pidana

**(LEGAL ANALYSIS OF PASSPORT APPLICATION EFFORTS
BY ATTACHING FALSE DOCUMENTS AS A REQUIREMENT
FOR POPULATION DATA)**

Deky Aprian

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri
Jakarta

Abstract

In the use of travel documents of the Republic of Indonesia in practice there are still many that are misused by their holders, thus causing a threat to the Indonesian state originating from outside the territory of Indonesia. The purpose of this study was to determine the criminal law enforcement process for attempts to use fake residence documents in the passport application process at the Immigration Office. This research is empirical normative research. A conclusion was reached Immigration law is part of the positive legal rules that exist in Indonesia and is part of state administrative law that runs government in a narrow sense. The essence of immigration itself, is a series of activities in the provision of services and law enforcement as well as safeguarding traffic in and out of people from and into the territory of the Republic of Indonesia, as well as monitoring the presence of foreign nationals in the territory of the Republic of Indonesia The provisions of the Immigration Law confirm that Immigration officials have the right to refuse a person to leave Indonesia's territory in the event that the person does not have a valid travel document and is still valid. Several legal provisions that can be used to ensnare perpetrators of document forgery in making passports, including the provisions of the Criminal Code (KUHP) and legal provisions contained in the immigration laws and regulations.

Keywords: *Passports, Fake Documents, Population Data, Crime*